

Relasi Kiai-Santri dan Tuduhan Feodalisme dalam Tradisi Pesantren: Kajian Tafsir Tematik Atas Otoritas, Adab, dan Kritik

Ulfatul Hasanah¹, Abd. Basid²✉

^{1,2}Ilmu Alqur'an dan Tafsir Universitas Nurul Jadid, Indonesia

E-mail: abd.basid@unuja.ac.id²✉

| ARTICLE HISTORY | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| Received: April 2026 | Revised: Mei 2026 | Accepted: June 2026 |

Abstrak

Latar Belakang: Artikel ini menganalisis tuduhan feodalisme dalam relasi kiai-santri di pesantren melalui pendekatan tafsir tematik Al-Qur'an. Isu ini mengemuka seiring berkembangnya wacana publik yang menilai praktik *ta'dzim* santri kepada kiai sebagai bentuk relasi subordinatif yang menyerupai struktur feodal. **Tujuan Penelitian:** penelitian ini bertujuan menganalisis tuduhan feodalisme dalam relasi kiai-santri melalui kajian tafsir tematik Al-Qur'an serta menjelaskan batas antara otoritas pedagogis-keagamaan dan dominasi feodal dalam tradisi pesantren. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif berbasis studi kepustakaan dengan menjadikan Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai sumber primer. Analisis dilakukan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan adab terhadap ilmu, otoritas moral, dan prinsip koreksi dalam Islam, lalu dibaca dengan bantuan teori relasi kuasa Michel Foucault dan kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kiai-santri dalam kerangka normatif Al-Qur'an tidak bertumpu pada dominasi feodal, tetapi pada legitimasi keilmuan, etika penghormatan, dan tanggung jawab moral. Penghormatan kepada kiai merupakan bentuk pengakuan simbolik atas otoritas ilmu, bukan pengultusan personal yang menutup ruang kritik. Dalam perspektif ini, pesantren dapat dipahami sebagai institusi pedagogis-keagamaan yang menempatkan adab dan otoritas dalam hubungan yang seimbang dengan prinsip *amr ma'ruf nahi munkar*. **Kesimpulan:** Artikel ini menegaskan pentingnya membedakan antara otoritas keilmuan yang sah dan praktik feodalistik yang bertentangan dengan etika Islam.

Kata Kunci: *Pesantren; Feodalisme; Relasi Kiai-Santri; Tafsir Tematik; Otoritas Pedagogis*

Abstract

Background: This article analyzes allegations of feudalism in the kiai-santri relationship at Pondok Pesantren through a thematic interpretation of the Qur'an. This issue has come to the fore alongside the development of public discourse that views the practice of *ta'dzim* (reverence) by santri toward kiai as a form of subordinate relationship resembling a feudal structure. **Research Objectives:** penelitian ini bertujuan menganalisis tuduhan feodalisme dalam relasi kiai-santri melalui kajian tafsir tematik Al-Qur'an serta menjelaskan batas antara otoritas pedagogis-keagamaan dan dominasi feodal dalam tradisi pesantren.

Research Method: This study employs an interpretive qualitative method based on a literature review, using Hamka's *Tafsir Al-Azhar* and M. Quraish Shihab's *Tafsir Al-Misbah* as primary sources. An analysis was conducted on verses related to etiquette toward knowledge, moral authority, and the principle of correction in Islam, which were then interpreted using Michel Foucault's theory of power relations and Pierre Bourdieu's concept of symbolic power. **Research Findings:** The research findings indicate that the kiai-santri relationship within the normative framework of the Qur'an does not rest on feudal domination, but rather on scholarly legitimacy, an ethic of respect, and moral responsibility. Respect for the kiai constitutes a symbolic acknowledgment of scholarly authority, not a form of personal deification that stifles critical discourse. From this perspective, the pesantren can be understood as a pedagogical-religious institution that places etiquette and authority in a balanced relationship with the principle of *amr ma'ruf nahi munkar*. **Conclusion:** This article emphasizes the importance of distinguishing between legitimate scholarly authority and feudalistic practices that contradict Islamic ethics.

Keywords: Pesantren; Feudalism; Kiai-Santri Relationship; Thematic Exegesis; Pedagogical Authority

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kekhasan dalam sistem pembelajaran, pola pembinaan karakter, serta struktur relasi sosial-keagamaan di dalamnya (Anjani et al., 2025; Isbah, 2020; Ningsih et al., 2023; Sabila et al., 2024). Kekhasan tersebut tampak pada keberadaan kiai sebagai figur sentral, tradisi pengajaran kitab klasik, sistem asrama, serta pembentukan etika santri yang menempatkan adab sebagai bagian integral dari proses menuntut ilmu (Dian et al., 2024; Fahham, 2020). Fungsi pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan penguasaan ilmu keagamaan, tetapi juga pembentukan nilai, sikap sosial dan karakter peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat (Utami & Ritinga, 2025). Dalam konteks ini, relasi antara kiai dan santri tidak hanya berfungsi sebagai hubungan pedagogis, tetapi juga membentuk tata nilai, otoritas moral, dan mekanisme transmisi keilmuan yang khas dalam tradisi pesantren (Achmadin et al., 2024; Maryam, 2023). Oleh sebab itu, hubungan kiai-santri tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan personal, melainkan sebagai konstruksi sosial-keagamaan yang dibentuk oleh nilai ilmu, keteladanan, dan legitimasi moral (Pitriyani et al., 2024; Sofi et al., 2025).

Namun demikian, dalam perkembangan wacana publik kontemporer, relasi khas tersebut kerap dibaca secara problematis. Sejumlah pandangan menuduh bahwa pesantren masih mempertahankan pola feodalisme, terutama karena tingginya penghormatan santri terhadap kiai dan kuatnya posisi simbolik kiai dalam struktur kehidupan pesantren (Safitri et al., 2026; Wahyuni, 2025). Tuduhan ini umumnya bertumpu pada dua asumsi. Pertama, penghormatan santri kepada kiai dianggap berlebihan sehingga dipahami sebagai bentuk ketundukan tanpa jarak (Chasanah, 2021). Kedua, kiai dipersepsikan sebagai figur yang seolah-olah tidak dapat dikritik karena ditempatkan pada posisi yang terlalu tinggi dalam kesadaran sosial santri (Basid et al., 2025; Putri et al., 2025). Dari sinilah kemudian muncul generalisasi bahwa pesantren identik dengan sistem sosial yang hierarkis, tertutup, dan feodal.

Pembacaan semacam itu sesungguhnya perlu ditinjau kembali secara lebih hati-hati. Secara konseptual, feodalisme merupakan sistem relasi kuasa yang bertumpu pada dominasi, ketimpangan hak, dan subordinasi struktural antara pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai (Owen, 2020). Sementara itu, dalam tradisi pesantren, penghormatan kepada kiai tidak lahir semata-mata dari paksaan struktural, melainkan dari etika keilmuan, kesadaran spiritual, dan pengakuan terhadap otoritas moral yang dibangun melalui proses pendidikan (Helmi et al., 2026). Dengan kata lain, tidak setiap hubungan hierarkis dapat serta-merta dikategorikan sebagai feodalisme. Pada titik ini, diperlukan kerangka analisis yang mampu membedakan secara tegas antara otoritas pedagogis-keagamaan yang sah dengan dominasi feodal yang menutup ruang kesadaran dan kritik.

Dalam kajian akademik, tema feodalisme, otoritas, dan relasi sosial di lingkungan pesantren memang telah mulai dibahas dari berbagai sudut pandang. Penelitian Aghitsna

Ahmad Al-Qusyairi membahas feodalisme dalam perspektif Sayyid Qutb melalui telaah atas *Fi Zilal al-Qur'an*, sedangkan kajian tentang otoritas dan feodalisme dalam tradisi pesantren Indonesia telah menyoroti relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan modal keagamaan (Al Qusyairi, 2024). Di sisi lain, penelitian Ade Rahma Triani dkk. mengkaji konsep adab dalam menuntut ilmu pada QS. al-Mujadalah ayat 11 melalui studi komparatif tafsir ulama Nusantara (Triani et al., 2025). Meskipun demikian, studi-studi tersebut masih menyisakan ruang yang belum banyak disentuh, yaitu kajian yang secara khusus menelaah tuduhan feodalisme dalam relasi kiai-santri dengan menjadikan tafsir Al-Qur'an sebagai kerangka utama analisis. Dengan demikian, persoalan ini belum cukup dijelaskan hanya melalui pendekatan sosiologis atau normatif semata, tetapi membutuhkan pembacaan tafsir yang mampu menunjukkan dasar etik dan epistemik dari relasi tersebut.

Bertolak dari celah kajian tersebut, artikel ini berupaya menganalisis kembali stigma feodalisme yang dilekatkan pada pesantren dengan menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an. Fokus analisis diarahkan pada dua persoalan utama yang paling sering dijadikan dasar tuduhan, yaitu penghormatan santri kepada kiai dan anggapan bahwa kiai merupakan figur yang tidak dapat dikritik. Untuk membaca dua persoalan tersebut, artikel ini menggunakan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan adab terhadap ilmu, pengakuan terhadap otoritas keilmuan, dan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*. Pendekatan ini dipandang penting agar penilaian terhadap tradisi pesantren tidak berhenti pada kesan-kesan permukaan, tetapi berpijak pada horizon normatif Islam yang lebih mendalam.

Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa relasi kiai-santri dalam pesantren pada dasarnya dibangun di atas fondasi adab, legitimasi keilmuan, dan tanggung jawab moral, bukan atas struktur dominasi feodal. Dalam pendidikan Islam, hubungan antara pendidik dan peserta didik tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter religius dan internalisasi nilai-nilai keislaman (Indrawan & Nasihin, 2025). Artikel ini juga hendak menegaskan bahwa penghormatan kepada kiai harus dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap otoritas ilmu dan keteladanan, sedangkan kemungkinan kritik tetap terbuka dalam kerangka etika Islam ketika otoritas tersebut menyimpang dari nilai kebenaran. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada upaya membedakan secara konseptual antara otoritas keagamaan yang bersifat pedagogis dan feodalisme yang bersifat dominatif, sehingga diskursus tentang pesantren dapat diletakkan dalam kerangka analisis yang lebih adil, proporsional, dan ilmiah.

Lebih eksplisitnya, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengkaji tuduhan feodalisme dalam relasi kiai-santri melalui pendekatan tafsir tematik Al-Qur'an yang dipadukan dengan analisis teori sosial Pierre Bourdieu. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas feodalisme pesantren dari perspektif sosiologi, pendidikan atau studi media. Artikel ini menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai kerangka utama untuk menilai legitimasi otoritas keagamaan, adab terhadap guru dan ruang kritik

dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa pembedaan yang lebih jelas antara otoritas pedagogis-keagamaan yang berbasis ilmu dan keteladanan dengan relasi feodal yang berbasis dominasi dan subordinasi struktural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat interpretatif. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian penelitian bukan berupa perilaku empiris yang diobservasi secara langsung, melainkan wacana, konsep, dan konstruksi makna yang berkaitan dengan tuduhan feodalisme dalam relasi kiai-santri di pesantren. Dalam konteks ini, penelitian kepustakaan dipandang relevan untuk menelaah bagaimana Al-Qur'an, melalui penafsiran para *mufassir*, memberikan landasan normatif terhadap persoalan otoritas, penghormatan, dan kritik dalam tradisi pendidikan Islam.

Objek material penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan adab terhadap ilmu, legitimasi otoritas keilmuan, dan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan sosial-keagamaan. Sementara itu, objek formal penelitian ini adalah tuduhan feodalisme dalam sistem pendidikan pesantren, khususnya pada relasi antara kiai dan santri. Dengan pembedaan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada penjelasan normatif ayat, tetapi diarahkan untuk membaca relevansi tafsir Al-Qur'an terhadap perdebatan kontemporer mengenai otoritas dan relasi kuasa di lingkungan pesantren.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Data primer berupa karya tafsir yang dijadikan rujukan utama, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Kedua tafsir ini dipilih karena memiliki otoritas yang kuat dalam tradisi tafsir Indonesia serta representatif dalam menjelaskan dimensi etika, pendidikan, dan sosial Al-Qur'an dalam konteks keindonesiaan. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan literatur akademik lain yang relevan dengan tema pesantren, feodalisme, relasi kuasa, adab menuntut ilmu, dan kritik terhadap otoritas keagamaan. Dalam naskah awal, sumber primer dan sekunder memang sudah disebutkan, tetapi belum dijelaskan alasan pemilihannya; karena itu, bagian ini perlu dipertegas agar metode tampak lebih terarah.

Dalam proses seleksi literatur, penelitian ini menggunakan beberapa kriteria, yaitu: (1) relevansi substansi dengan tema relasi kiai-santri, otoritas keagamaan, adab menuntut ilmu dan feodalisme; (2) kredibilitas akademik sumber yang ditunjukkan melalui publikasi pada jurnal ilmiah, buku akademik atau karya tafsir yang otoritatif; dan (3) keterkaitan teoritis dengan pendekatan tafsir tematik maupun teori relasi kuasa yang digunakan dalam penelitian. Kriteria tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validasi akademik dan mendukung analisis secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, memilih, mengelompokkan, dan mencatat sumber-sumber tertulis yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu

mengidentifikasi isu utama yang berkembang dalam wacana publik mengenai pesantren, khususnya tuduhan bahwa penghormatan santri kepada kiai merupakan bentuk feodalisme dan anggapan bahwa kiai diposisikan sebagai figur yang tidak dapat dikritik. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti kemudian menyeleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema adab, ilmu, otoritas, dan koreksi moral.

Ayat yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah QS. al-Mujadalah (58): 11 dan QS. Ali 'Imran (3): 104. Pemilihan kedua ayat tersebut didasarkan pada relevansinya dengan tema relasi kiai-santri yang menjadi fokus penelitian. QS. Al-Mujadalah (58): 11 menjelaskan kemuliaan orang yang berilmu dan etika dalam majelis ilmu yang menjadi landasan normatif penghormatan santri kepada kiai. Adapun QS. Ali 'Imran (3): 104 dipilih karena memuat prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam mengingatkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan demikian, kedua ayat tersebut menjadi dasar analisis untuk memahami relasi kiai-santri secara proporsional, baik dalam aspek penghormatan terhadap otoritas keilmuan maupun dalam aspek kritik dan kontrol sosial yang diakui dalam ajaran Islam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) yang dipadukan dengan teknik deskriptif-analitis. Secara operasional, langkah-langkah analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, menetapkan tema utama penelitian, yaitu relasi kiai-santri dan tuduhan feodalisme dalam pesantren. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang relevan dengan tema tersebut berdasarkan kata kunci dan substansi makna. Ketiga, menelaah penafsiran ayat-ayat terpilih dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Keempat, membandingkan penekanan makna dari kedua tafsir untuk menemukan titik temu maupun kekhasan masing-masing *mufasssir*. Kelima, menghubungkan temuan tafsir tersebut dengan konteks sosial pesantren secara analitis sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai batas antara otoritas pedagogis-keagamaan dan dominasi feodal.

Untuk memperkuat pembacaan analitis, penelitian ini memanfaatkan teori relasi kuasa Michel Foucault dan konsep kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu. Teori Foucault digunakan untuk membaca bahwa relasi kuasa tidak selalu hadir dalam bentuk dominasi represif, tetapi dapat bekerja secara produktif melalui pengetahuan, wacana, dan praktik sosial. Dalam konteks pesantren, teori ini membantu menjelaskan bahwa hubungan kiai-santri tidak otomatis identik dengan penindasan, melainkan dapat terbentuk melalui legitimasi keilmuan, tradisi, dan tata nilai yang hidup dalam komunitas. Sementara itu, konsep kekuasaan simbolik Bourdieu digunakan untuk menjelaskan bagaimana penghormatan santri kepada kiai memperoleh pengakuan sosial sebagai sesuatu yang wajar karena berakar pada otoritas ilmu, *habitus* religius, dan struktur budaya pesantren. Dengan demikian, kedua teori ini tidak dipakai sebagai alat untuk menggantikan tafsir Al-Qur'an, melainkan sebagai perangkat bantu untuk membaca dimensi sosial dari makna yang dihasilkan oleh teks tafsir. Dalam naskah awal, Foucault dan Bourdieu sudah disebut, tetapi fungsi analitis keduanya belum dijelaskan secara eksplisit.

Untuk menjaga konsistensi interpretasi, penelitian ini menempatkan Al-Qur'an dan tafsir sebagai pijakan utama, sedangkan teori sosial berfungsi sebagai kerangka pembacaan kontekstual. Dengan model ini, analisis tidak terjebak pada pembelaan normatif semata, tetapi juga tidak terlepas dari horizon etik Al-Qur'an. Hasil akhirnya diarahkan untuk menunjukkan apakah penghormatan santri kepada kiai dan posisi kiai dalam struktur pesantren merupakan bentuk feodalisme, atau justru merupakan manifestasi dari adab, pengakuan terhadap ilmu, dan tanggung jawab moral dalam pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghormatan Santri kepada Kiai sebagai Isu Pokok dalam Tuduhan Feodalisme

Salah satu tuduhan yang paling sering diarahkan kepada pesantren adalah bahwa pola penghormatan santri kepada kiai merupakan bentuk ketundukan yang menyerupai relasi feodal (Ashimulloh & Maula, 2025). Tuduhan ini biasanya bertumpu pada praktik keseharian di lingkungan pesantren, seperti sikap tawaduk, khidmah, kepatuhan terhadap nasihat guru, serta kebiasaan menjaga sopan santun secara ketat di hadapan kiai (Mufaizin et al., 2026). Dalam pembacaan yang dangkal, praktik-praktik tersebut dianggap sebagai tanda subordinasi mutlak santri terhadap figur kiai. Akan tetapi, dalam tradisi pendidikan Islam, penghormatan kepada guru tidak dapat langsung dipahami sebagai bentuk dominasi, sebab ia berakar pada konsep adab yang menjadi fondasi etis dalam proses transmisi ilmu (Shahara & Masyithoh, 2025).

Dalam struktur pendidikan pesantren, kiai tidak semata-mata hadir sebagai pemegang kuasa institusional, melainkan sebagai figur yang memperoleh legitimasi melalui ilmu, keteladanan, dan pengabdian (Nu'man, 2025). Dengan demikian, penghormatan santri kepada kiai harus dibaca dalam kerangka pedagogis dan spiritual, bukan semata-mata dalam kerangka stratifikasi sosial. Santri menghormati kiai bukan karena berada dalam relasi penaklukan, melainkan karena memandang ilmu sebagai sesuatu yang sakral dan perantara ilmu sebagai pihak yang harus dimuliakan secara proporsional (Bashri, 2021). Relasi semacam ini menunjukkan bahwa penghormatan dalam pesantren lebih dekat kepada etika pendidikan daripada pola ketundukan sosial yang bersifat feodal.

Di titik ini, penting ditegaskan bahwa hierarki dalam pendidikan tidak selalu identik dengan feodalisme. Setiap sistem pendidikan mengandaikan adanya otoritas keilmuan. Perbedaannya terletak pada sumber dan tujuan otoritas tersebut. Dalam sistem feodal, hierarki dibangun atas dasar privilese keturunan, dominasi status, dan ketimpangan hak (Guanglin, 2023; Yuniawanti, 2025). Sebaliknya, dalam pesantren, hierarki dibangun atas dasar pengakuan terhadap ilmu, pengalaman, dan integritas moral (Mudhofar et al., 2025). Oleh karena itu, tuduhan feodalisme menjadi problematis ketika tidak membedakan antara penghormatan yang berlandaskan adab dengan ketundukan yang lahir dari pemaksaan struktural.

Pembacaan Tafsir atas QS. Al-Mujadalah (58): 11 dan Fondasi Adab terhadap Ilmu

Untuk menelaah dasar normatif penghormatan kepada kiai, artikel ini menempatkan QS. Al-Mujadalah (58): 11 sebagai ayat kunci. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang etika

dalam majelis, tetapi juga menegaskan kemuliaan orang-orang beriman dan berilmu (Rofina et al., 2024). Dalam konteks pendidikan Islam, ayat ini memberikan pesan bahwa ilmu menuntut kesiapan etis, keterampilan sosial, serta pengakuan terhadap posisi orang yang membawa dan mengajarkan ilmu. Karena itu, penghormatan kepada guru dalam majelis ilmu bukanlah bentuk pengkultusan, melainkan ekspresi dari tata etika yang menopang proses belajar (Memon et al., 2024; Mudzakkir et al., 2024).

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menafsirkan ayat ini dengan menekankan pentingnya kelapangan dalam majelis sebagai bagian dari akhlak sosial (HAMKA, 2015). Perintah untuk memberi ruang tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga mencerminkan pendidikan jiwa agar seseorang memiliki empati, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap orang lain dalam ruang ilmu. Hamka juga menegaskan bahwa iman dan ilmu merupakan dua unsur yang meninggikan martabat manusia. Ketinggian derajat itu bukan diberikan karena kekayaan, nasab, atau kekuasaan, melainkan karena kualitas iman dan ilmu yang dimiliki. Dalam kerangka ini, penghormatan terhadap orang berilmu merupakan konsekuensi etis dari penghargaan Islam terhadap ilmu itu sendiri (Mudzakkir et al., 2024).

Sejalan dengan itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memahami ayat ini sebagai pedoman etika sosial dalam majelis yang menuntut keluasan hati, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap tata tertib bersama. Menurutnya, ayat ini menegaskan bahwa orang berilmu memperoleh kedudukan yang tinggi karena ilmu memberi manfaat, membimbing manusia kepada kebenaran, dan membentuk tanggung jawab moral (Shihab, 2021). Dengan demikian, penghormatan kepada guru bukanlah bentuk penghambaan kepada individu, tetapi pengakuan terhadap fungsi ilmu sebagai penuntun hidup. Dalam tradisi pesantren, kiai dihormati karena posisinya sebagai pengemban ilmu, bukan karena status sosial yang bersifat mutlak (Sutriyono et al., 2025).

Bila dikaitkan dengan konteks relasi kiai-santri, QS. Al-Mujadalah (58): 11 menunjukkan bahwa adab merupakan bagian intern dari proses pencarian ilmu. Sikap tawaduk santri, kesediaan melayani guru, dan kehati-hatian dalam bersikap tidak dapat langsung didefinisikan sebagai gejala feodal (Firmansyah et al., 2024). Justru dalam horizon ayat ini, adab berfungsi sebagai medium pembentukan karakter intelektual dan spiritual. Ilmu tidak dipisahkan dari etika, dan otoritas guru tidak dipahami sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai amanah yang lahir dari kedalaman ilmu dan tanggung jawab moral.

Pembacaan Sosial melalui Foucault dan Bourdieu: Otoritas sebagai Relasi Produktif dan Simbolik

Setelah fondasi normatif penghormatan terhadap ilmu ditegaskan melalui tafsir, pembahasan perlu dilanjutkan pada level sosial dengan membaca bagaimana otoritas bekerja dalam ruang pesantren. Di sini, teori Michel Foucault membantu menjelaskan bahwa relasi kuasa tidak selalu hadir dalam bentuk penindasan yang represif. Kekuasaan dapat bekerja secara produktif melalui wacana, pengetahuan, disiplin, dan pembentukan subjek (Pratama, 2021; Sulistyowati & Sukino, 2026). Dalam konteks pesantren, kiai tidak

semata-mata memerintah, tetapi membentuk *habitus* keilmuan, cara berpikir, tata adab, dan orientasi moral santri (Taufiq et al., 2024). Artinya, otoritas kiai beroperasi melalui produksi makna dan pembentukan karakter, bukan semata-mata melalui kontrol koersif (Astuti & Winarti, 2026).

Dengan sudut pandang ini, relasi kiai-santri lebih tepat dipahami sebagai relasi pedagogis yang melahirkan disiplin spiritual dan intelektual (Machmudi, 2021). Santri belajar bukan hanya isi ilmu, tetapi juga cara menempatkan diri, cara berbicara, cara berbeda pendapat, dan cara menghormati sumber ilmu. Kuasa dalam ruang semacam ini tidak identik dengan penindasan, melainkan berfungsi membentuk subjek yang taat secara etis dan matang secara spiritual. Karena itu, penyamaan sederhana antara otoritas pesantren dan feodalisme menjadi tidak memadai, sebab keduanya bekerja dengan logika yang berbeda.

Sementara itu, Pierre Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik memberi penjelasan bahwa suatu otoritas dapat diterima secara luas karena memperoleh legitimasi budaya (Christensen, 2024; Fowler, 2020). Penghormatan santri kepada kiai berlangsung karena komunitas pesantren mengakui bahwa kiai memiliki modal simbolik berupa ilmu, kesalehan, sanad keilmuan, dan keteladanan. Pengakuan ini bukan ilusi belaka, tetapi terbentuk melalui sejarah, tradisi, serta pengalaman kolektif bahwa kiai memang berfungsi sebagai penjaga nilai dan pewaris ilmu. Oleh sebab itu, penghormatan kepada kiai merupakan hasil dari pengakuan simbolik yang berbasis legitimasi keilmuan, bukan bentuk dominasi feodal yang dipertahankan hanya karena status sosial (Hasan, 2025).

Dalam perspektif gabungan antara tafsir dan teori sosial, dapat dikatakan bahwa praktik penghormatan santri kepada kiai merupakan bentuk internalisasi adab yang didukung oleh legitimasi simbolik. Ia tidak lahir dari penaklukan, melainkan dari kesadaran religius bahwa ilmu menuntut penghormatan terhadap sumbernya. Pada titik inilah tuduhan feodalisme kehilangan ketepatannya, sebab yang bekerja dalam pesantren bukan logika dominasi berbasis privilese, melainkan logika pembentukan etis berbasis ilmu dan pengakuan sosial.

Anggapan bahwa Kiai Tidak Dapat Dikritik sebagai Isu Kedua dalam Wacana Feodalisme

Selain soal penghormatan, tuduhan feodalisme terhadap pesantren juga muncul dari anggapan bahwa kiai diposisikan sebagai figur yang seolah-olah suci dan tidak dapat dikritik (Putri et al., 2025). Asumsi ini lahir dari kenyataan bahwa dalam kultur pesantren, ucapan kiai sering memperoleh bobot moral yang tinggi dan nasihatnya diterima dengan penuh hormat oleh santri. Namun, problem muncul ketika penghormatan tersebut dibaca sebagai penutupan ruang koreksi, seakan-akan otoritas kiai berada di atas prinsip kebenaran itu sendiri.

Pandangan demikian perlu diuji secara lebih cermat. Dalam tradisi Islam, tidak ada manusia yang bebas dari kemungkinan salah selain para nabi dalam batas yang ditetapkan akidah. Karena itu, penghormatan kepada ulama, guru, atau kiai tidak pernah dimaksudkan

untuk meniadakan koreksi. Yang dijaga oleh tradisi Islam adalah etika dalam mengoreksi, bukan larangan untuk mengoreksi (Farihin & Khasani, 2023). Dalam konteks pesantren, hal ini berarti kiai tetap dihormati sebagai guru dan pembimbing (Kurniati et al., 2019), tetapi penghormatan tersebut tidak boleh berubah menjadi pengkultusan yang menutup *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dengan demikian, jika ada anggapan bahwa pesantren membungkam kritik terhadap kiai secara prinsipil, anggapan tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam Islam. Yang lebih tepat adalah membedakan antara kritik yang beradab dengan penolakan yang destruktif. Pesantren memang membentuk budaya hormat, tetapi budaya hormat itu semestinya tidak dipahami sebagai penghapusan tanggung jawab moral untuk menjaga kebenaran (Yanwari et al., 2025).

Pembacaan Tafsir atas QS. Ali 'Imran (3): 104 dan Ruang Kritik dalam Etika Islam

Ayat yang penting untuk menjelaskan persoalan ini adalah QS. Ali 'Imran (3): 104 yang memerintahkan adanya sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *makruf*, dan mencegah dari yang *mungkar* (Afandi et al., 2022). Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial Islam dibangun di atas tanggung jawab kolektif untuk menjaga kebaikan publik (Zulkarnain, 2024). Dengan demikian, tidak ada otoritas sosial-keagamaan yang secara prinsip kebal dari koreksi ketika keluar dari koridor kebenaran.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menempatkan ayat ini sebagai seruan agar umat Islam memiliki keberanian moral dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan. Dakwah tidak berhenti pada ceramah, tetapi mengandung tuntutan etis untuk memelihara masyarakat dari penyimpangan (HAMKA, 2015). Bila ditarik ke dalam konteks pesantren, penafsiran ini memberi dasar bahwa penghormatan kepada kiai tidak boleh mematikan tanggung jawab moral untuk menegur penyimpangan. Justru otoritas keagamaan harus senantiasa berada dalam orbit *amar ma'ruf nahi munkar*.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah juga menekankan bahwa ayat ini berbicara tentang perlunya kelompok yang memiliki kepedulian sosial dan komitmen terhadap perbaikan moral masyarakat (Shihab, 2021). Seruan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran menunjukkan bahwa Islam tidak membangun masyarakat atas dasar kepatuhan buta, melainkan atas dasar tanggung jawab etis bersama. Karena itu, bila seorang kiai, guru, atau otoritas keagamaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat dan kemaslahatan, maka koreksi tetap dimungkinkan, bahkan dibenarkan, selama dilakukan dengan adab, ilmu, dan niat perbaikan.

Dalam konteks ini, ruang kritik dalam pesantren sesungguhnya bukan dihapus, tetapi diatur oleh etika. Kritik tidak dilakukan dengan meruntuhkan kehormatan guru secara serampangan, melainkan dengan menjaga niat, cara, dan tujuan (Sumarna & Rosidin, 2024). Prinsip ini penting karena artikel ini tidak hendak menggambarkan pesantren sebagai ruang yang steril dari penyimpangan, melainkan menegaskan bahwa secara normatif Islam

tidak pernah melegitimasi pengkultusan individu. Dengan kata lain, penghormatan kepada kiai harus selalu berada di bawah prinsip kebenaran, bukan sebaliknya.

Menegaskan Batas antara Otoritas Pedagogis dan Feodalisme

Dari keseluruhan pembahasan di atas, tampak bahwa relasi kiai-santri tidak dapat disamakan secara sederhana dengan feodalisme. Penghormatan santri kepada kiai, bila dibaca melalui QS. Al-Mujadalah (58): 11, berakar pada adab terhadap ilmu dan pengakuan terhadap kemuliaan orang berilmu (Triani et al., 2025). Pada saat yang sama, QS. Ali 'Imran (3): 104 menegaskan bahwa setiap komunitas Muslim memiliki kewajiban moral untuk menjaga kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk ketika penyimpangan itu datang dari figur yang dihormati (Zulkarnain, 2024).

Dengan demikian, otoritas kiai dalam pesantren lebih tepat dipahami sebagai otoritas pedagogis-keagamaan. Ia sah sejauh bertumpu pada ilmu, keteladanan, dan tanggung jawab moral. Otoritas ini berbeda dari feodalisme, karena tidak dibangun atas dasar privilese turun-temurun, dominasi kelas, atau penaklukan sosial (Sari et al., 2025). Sebaliknya, ia memperoleh legitimasi dari kepercayaan komunitas terhadap kualitas keilmuan dan integritas moral kiai. Namun, legitimasi tersebut bukan tanpa batas. Ketika otoritas terlepas dari nilai kebenaran dan menutup ruang koreksi, pada saat itulah ia berpotensi bergeser dari otoritas pedagogis menuju penyalahgunaan kuasa simbolik.

Oleh sebab itu, temuan utama artikel ini adalah bahwa pesantren pada dasarnya membangun keseimbangan antara penghormatan dan kritik, antara adab dan *amar ma'ruf nahi munkar*, serta antara legitimasi simbolik dan tanggung jawab moral. Tuduhan feodalisme terhadap pesantren menjadi tidak tepat apabila hanya didasarkan pada tampilan lahiriah penghormatan santri kepada kiai tanpa memahami dasar etik dan epistemik yang menopangnya. Justru yang perlu dijaga adalah agar tradisi penghormatan itu tetap berada dalam koridor Al-Qur'an: menghormati ilmu, memuliakan guru, tetapi tidak menempatkan siapa pun di atas prinsip kebenaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembacaan tematik terhadap QS. Al-Mujadalah (58): 11 dan QS. Ali 'Imran (3): 104, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kiai-santri dalam tradisi pesantren tidak dapat disamakan secara sederhana dengan sistem feodalisme. Penghormatan santri kepada kiai pada dasarnya berakar pada adab terhadap ilmu, pengakuan atas legitimasi keilmuan, serta kesadaran etis bahwa proses pendidikan Islam tidak hanya menuntut penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter spiritual dan moral. Dalam kerangka ini, penghormatan kepada kiai bukan merupakan bentuk ketundukan dominatif, melainkan ekspresi penghargaan terhadap otoritas keilmuan yang dibangun melalui keteladanan, sanad keilmuan, dan tanggung jawab moral.

Pada saat yang sama, penelitian ini juga menegaskan bahwa otoritas kiai dalam pesantren bukanlah otoritas absolut yang menutup kemungkinan koreksi. QS. Ali 'Imran (3): 104 memberikan dasar normatif bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tanggung

jawab kolektif umat Islam, sehingga tidak ada figur sosial-keagamaan yang berada di atas prinsip kebenaran. Dengan demikian, tradisi pesantren pada dasarnya tidak meniadakan kritik, melainkan menempatkannya dalam kerangka etika, adab, dan orientasi perbaikan. Kritik terhadap kiai tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan secara proporsional, berilmu, dan tidak keluar dari prinsip penghormatan yang diajarkan Islam.

Temuan ini mengantarkan pada penegasan bahwa relasi kiai–santri lebih tepat dipahami sebagai otoritas pedagogis-keagamaan, bukan relasi feodal. Otoritas tersebut sah sejauh bertumpu pada ilmu, integritas moral, dan fungsi pendidikan, sedangkan feodalisme bertumpu pada dominasi, privilese status, dan ketimpangan yang bersifat menundukkan. Oleh karena itu, tuduhan feodalisme terhadap pesantren sering kali lahir dari pembacaan yang tidak membedakan antara hierarki pendidikan yang etis dengan struktur dominasi sosial yang eksploitatif.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya menghadirkan pembacaan tafsir Al-Qur'an untuk menilai secara lebih adil perdebatan tentang otoritas dan penghormatan dalam pesantren. Artikel ini menegaskan bahwa tradisi *ta'dzim* kepada kiai harus dipahami dalam horizon adab dan penghormatan terhadap ilmu, namun pada saat yang sama tetap berada di bawah prinsip kebenaran dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, pesantren dapat dipahami sebagai institusi pendidikan Islam yang menyeimbangkan antara penghormatan, otoritas, dan sikap kritis dalam kerangka etika Al-Qur'an.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmadin, B. Z., Asrori, M., Barizi, A., Amrullah, A. M. K., & Nafis, M. M. (2024). Deconstructing the Kiai and Santri Relationship: A Critical Review of Power and Cultural Dynamics. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 26(2), 367–392. <https://doi.org/10.18860/eh.v26i2.29573>
- Afandi, A. Y., Pak Sobar, H. S. A. G., Drs. ., M. Pd, & Pak Ayi, Dr. H. A. S., Drs. ., M. Pd. I. (2022). Implikasi Pendidikan QS. Ali Imron Ayat 104 tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar terhadap Akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4629>
- Al Qusyairi, A. A. (2024). *Feodalisme Perspektif Sayyid Quṭb: Telaah atas Kitab tafsir fī Zilāl al-Qur'an*. STAI Al-Anwar Rembang.
- Anjani, A. R., Amanah, P., & Chadidjah, S. (2025). Pesantren Lembaga Pendidikan Tertua Di Indonesia dan Perkembangannya. *At-Tabayyurun: Journal Islamic Studies*, 7(1), 11–34. <https://doi.org/10.47766/atjjs.v7i1.6744>
- Ashimulloh, A., & Maula, N. A. (2025). Kritik Terhadap Fenomena Anggapan Feodalisme Di Pesantren: Analisis Penafsiran Surah Luqmān Ayat 14. *Pesantren Studies Annual Symposium on Pesantren Studies (Ansops) 2025*, 4(1), 15–27. <https://doi.org/10.35897/intaj.v4i1.388>

- Astuti, L., & Winarti, A. (2026). Moral Education in Islamic Boarding Schools for Shaping the Social Character of Adolescents. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 10(1), 20–36. <https://doi.org/10.35723/ajie.v10i1.220>
- Bashri, Y. (2021). Kiai in Indonesian Social-Political Changes. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 2(1), 67–88. <https://doi.org/10.35672/jnus.v2i1.67-88>
- Basid, Abd., Husna, R., & Somad, Abd. (2025). Pembinaan Al-Qur'an Serta Penanaman Moral kepada Siswa Musala Al-Muhakim Randutata Paiton Probolinggo. *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.58518/participatory.v4i1.3354>
- Chasanah, N. (2021). Leadership of Kiai and Students' Obedience in Islamic Boarding School. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(1). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v4i1.1875>
- Christensen, G. (2024). Three Concepts of Power: Foucault, Bourdieu, and Habermas. *Power and Education*, 16(2), 182–195. <https://doi.org/10.1177/17577438231187129>
- Dian, D., Hidayatulloh, R., Riyanti, T., & Aripin, J. (2024). The Role of Kiai Leadership in Developing Students' Character at Islamic Boarding School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(1), 234–246. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i1.4378>
- Fahham, A. M. (2020). *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak*. Publica Institute.
- Farihin, H., & Khasani, F. (2023). Etika Profetik Santri: Resepsi Hadis Pada Tradisi Pendidikan Pesantren. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.18860/jpai.v9i2.24128>
- Firmansyah, Pratama, I. P., & Munir. (2024). Symbolic Meanings in the Social Interaction of Santri in the Pesantren Environment. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(3), 1086–1102. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i3.698>
- Fowler, B. (2020). Pierre Bourdieu on Social Transformation, with Particular Reference to Political and Symbolic Revolutions. *Theory and Society*, 49(3), 439–463. <https://doi.org/10.1007/s11186-019-09375-z>
- Guanglin, M. (2023). The Feudal Contract and the Monarchy in Medieval England. *Social Sciences in China*, 44(2), 112–128. <https://doi.org/10.1080/02529203.2023.2223042>
- HAMKA. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani Press.
- Hasan, Moh. F. (2025). Educational Authority and Regulatory Legitimacy: Comparing Normative Systems in Pesantren and Public Schools in Indonesia. *Legal Pluralism and*

Critical Social Analysis, 57(2–3), 182–206.
<https://doi.org/10.1080/27706869.2025.2556586>

- Helmi, Moh. Affan, Abd. Somad, Ahmad Basuni, & Ahmad Sahidah. (2026). Epistemologi Pesantren sebagai Tradisi Pengetahuan Praksis: Otoritas, Habitus, dan Produksi Ilmu. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 11(01), 81. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v11i01.7219>
- Indrawan, B., & Nasihin, A. (2025). Strategi Guru Al-Qur'an Hadist dalam Memotivasi Siswa dengan Kesulitan Membaca Mushaf MA Plus Sunan Drajat 7. *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies*, 4 (2).
- Isbah, M. F. (2020). Pesantren in the Changing Indonesian Context: History and Current Developments. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i1.5629>
- Kurniati, M., Surur, M., & Rasyidi, A. H. (2019). Peran Kepemimpinan Kyai Dalam Mendidik Dan Membentuk Karakter Santri Yang Siap Mengabdikan Kepada Masyarakat. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 2(2), 194–203. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.80>
- Machmudi, Y. (2021). Modernization and Changes in Kiai-Santri Relations in Three Pesantrens in Java. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 58–79. <https://doi.org/10.15642/islamica.2021.16.1.58-79>
- Maryam, S. (2023). Implementasi Ta'dzim Santri Kepada Kyai dalam Lingkungan Pesantren Perspektif Pedagogi Relasional. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 4(1), 35–48. <https://doi.org/10.35672/jnus.v4i1.35-48>
- Memon, N. A., Abdalla, M., & Chown, D. (2024). Laying Foundations for Islamic Teacher Education. *Education Sciences*, 14(10), 1046. <https://doi.org/10.3390/educsci14101046>
- Mudhofar, A., Ibrahim, J. T., Wahyudi, & Saiman. (2025). *Dibalik Tembok Pesantren: Kekerasan Budaya dan Hierarki dalam Pendidikan Islam*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mudzakkir, A., Sakka, Abd. R., & Ismail, L. O. (2024). Penghormatan kepada Guru dalam Perspektif Islam: Kaitannya dengan Motivasi Belajar dan Efektivitas Pembelajaran. *Journal of Social and Scientific Education*, 89–99. <https://doi.org/10.58230/josse.v1i2.285>
- Mufaizin, Baitaputra, H., & Junaidi. (2026). Kiai, Santri, dan Kesetiaan Ilmiah: Kritik Terhadap Labelisasi Feodalisme Di Dunia Pesantren. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 1007–1011.
- Ningsih, I. W., Basri, H., & Suhartini, A. (2023). History and Development of Pesantren In Indonesia. *Jurnal Eduscience*, 10(1), 340–356. <https://doi.org/10.36987/jes.v10i1.3392>

- Nu'man, A. (2025). From Authority To Institutional Trust: A Study of Kyai Modalities In Pesantren Communities. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 74–88. <https://doi.org/10.33650/pjp.v12i1.11063>
- Owen, D. (2020). Migration, Structural Injustice and Domination on 'Race', Mobility and Transnational Positional Difference. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(12), 2585–2601. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1561067>
- Pitriyani, P., Sartika, E., & Ningsih, I. (2024). The Functional Significance of Reciting Dhikr Al-Ma'thurat: Exploring The Living Qur'an in Tahfiz Institution. *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 5(1), 47–73. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v5i1.10308>
- Pratama, R. A. (2021). Pemikiran Foucault dan Baron: Kekuasaan dan Pengetahuan Dalam Pendidikan dan Bahasa. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 33–43. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30543>
- Putri, N. A., Nurhayati, N., & Pariama, S. D. (2025). Pembingkai 'Feodalisme' Kiai dan Santri di Pesantren oleh Media Xpose Trans7: Analisis Wacana Kritis Fairclough. *Journal of Social Humanities and Education*, 1(2), 283–291. <https://doi.org/10.65310/a7pf2b20>
- Rofina, A., Ilmi, M. N. A. H., Nursyamsiyah, S., & Huda, H. (2024). Konsep Ilmu dan Pendidikan dalam Perspektif Surat Al-Mujadalah Ayat 11. *TARLIM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 7(1), 107–119. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v7i1.1766>
- Sabila, A. M., Arifin, S., & Humaidi, M. N. (2024). Islamic Boarding School in the Trajectory of Indonesian History: Origins, Characteristics, and Policy Dynamics. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(1), 45. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.440>
- Safitri, H. H., Albab, U., Khobir, A., Solehuddin, Moh. S., Adam Abd. Azid, M. A. Abd. A., & Khimmataliev, D. O. (2026). The Transformation of Religious Authority: A Critical Review of Fanaticism and Intellectual Freedom in Indonesian Islamic Boarding Schools. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 10(1), 53–74. <https://doi.org/10.21009/hayula.010.01.03>
- Sari, R. T., Madani, C., Afradini, A. R., Uyun, Q., & Chanigia, G. A. (2025). Otoritas dan Feodalisme dalam Tradisi Pesantren Indonesia: Sebuah Kajian Interdisipliner tentang Kekuasaan, Pengetahuan, dan Modal Keagamaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 207–218. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v3i4.1064>

- Shahara, N. A., & Masyithoh, S. (2025). Adab Guru dan Murid sebagai Refleksi Akhlak Islami: Implikasi terhadap Pembentukan Lingkungan Belajar Beretika. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 739–747. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1508>
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 7). Lentera Hati.
- Sofi, M. J., Manaf, S., & Ali, J. (2025). Pesantren In Dynamic Transformation: Harmonizing Classical Roots and Modern Practices. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 49(2), 333. <https://doi.org/10.30821/miqot.v49i2.1459>
- Sulistiyowati, D., & Sukino, A. (2026). Analisis Konsep Disiplin, Kekuasaan dan Normalisasi Sosial dalam Pendidikan Melalui Pendekatan Teori Michel Foucault. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 12(1), 393–402. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4701>
- Sumarna, C., & Rosidin, D. N. (2024). Kritik Atas Implementasi Kurikulum Merdeka di Era Dekadensi Nilai Moral Pendidik. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(1). https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.730
- Sutriyono, Usman, & Suharto, B. (2025). Kiai dan Transformasi Sosial: Dinamika Peran Kiai dalam Masyarakat Muslim Kontemporer. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(6), 701. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i6.7181>
- Taufiq, A., Sahdan, M. Z., & Setianingsih, D. (2024). Construction of Religious Habitus In Indonesian Islamic Boarding Schools. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 10(2), 187–201. <https://doi.org/10.18784/smart.v10i2.2458>
- Triani, A. R., Nasution, N. H., Azahra, N., Khairina, J., & Tarigan, Mhd. R. M. (2025). Konsep Adab Dalam Menuntut Ilmu Pada Surah Al-Mujadalah Ayat 11 (Studi Komparatif Tafsir Ulama Nusantara). *Al-Anshor: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.63911/rtfp0415>
- Utami, I. H., & Ritonga, M. (2025). Strategi Lembaga Pendidikan Islam untuk Memahami Keragaman dengan Cara Pandang Multikultural. *Al-kainah: Journal of Islamic Studies*, 4 (2).
- Wahyuni, E. S. (2025). Between Feudalism and Islamic Boarding School Manners: A Literature Review. *International Journal of Islamic Studies Issues*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.59966/e13w8c30>
- Yanwari, Y., Pujianti, E., & Widiastuti, N. (2025). Pembinaan Karakter Disiplin dan Akhlak Karimah Santri Putra Melalui Budaya Pesantren Di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin Jati Agung Lampung. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 2222–2232. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2629>

Yuniawanti, N. D. (2025, August 14). Public Policy, Patriarchal Culture, and Feudalism: Challenges in Combating Sexual Violence against Women in Indonesia. *Proceeding International Conference On Sustainable Environment And Innovation (ICOSEI)*. International Conference On Sustainable Environment And Innovation. <https://doi.org/10.53675/icosai.v1i1.1707>

Zulkarnain, Y. (2024). Analysis of Surah Al-Imran 104 in the Context of Social Leadership. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.54090/pawarta.332>